KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA

LAPORAN KINERJA
BIRO UMUM
TA 2021



KATA PENGANTAR



Laporan kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang merupakan penerapan prinsip *good governance* dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan kinerja Biro Umum Tahun 2021 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, akurat, dan akuntabel mengenai rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan inovasi Biro Umum kepada semua pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja Biro Umum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021, di tengah serangan pandemi Covid-19, Biro Umum berupaya untuk dapat mencapai 1 (satu) sasaran program/kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro. Capaian atas sasaran kegiatan Biro Umum merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal yang dilakukan secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran Biro Umum. Hal tersebut merupakan bentuk dari pengimplementasian *core values* Komnas HAM yaitu profesional, integritas, kredibel, independen dan responsif. Selain itu, perbaikan secara terus-menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran Biro Umum dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Biro Umum, serta diharapkan agar kedepannya kerjasama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan dapat meningkatkan layanan Biro Umum.

Akhir kata, Laporan Kinerja yang telah disusun ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Biro Umum.

Jakarta, Juni 2022

Kepala Biro Umum,

Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **3**

DAFTAR TABEL **4**

DAFTAR BAGAN **5**

DAFTAR GRAFIK **6**

DAFTAR GAMBAR **7**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

Latar Belakang **1**

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi **2**

Peran Strategis **4**

Sistematika Laporan **4**

BAB II **5**

PERENCANAAN KINERJA **5**

Rencana Strategis **5**

Perjanjian Kinerja **8**

BAB III **10**

AKUNTABILITAS KINERJA **10**

Capaian Kinerja **12**

Realisasi Anggaran **32**

BAB IV **34**

PENUTUP **34**

LAMPIRAN **36**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM TA 2021
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja Komnas HAM
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Target, dan Alokasi Biaya Biro Umum
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Umum
Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Target, dan Alokasi Biaya Biro Umum
Tabel 3.2 Komposisi Pegawai Komnas HAM di Kantor Pusat
Tabel 3.3 Komposisi Pegawai Komnas HAM di Kantor Perwakilan
Tabel 3.4 Alokasi CPNS Komnas HAM Tahun 2018 – 2021
Tabel 3.5 Proyeksi 5 (lima) Tahun Kebutuhan Formasi Komnas HAM
Tabel 3.6 Pengembangan Pegawai Komnas HAM Tahun 2017 - 2021
Tabel 3.7 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2020 - 2021
Tabel 3.8 Kebutuhan Formasi Penata Mediasi Sengketa HAM
Tabel 3.9 Produk Hukum Komnas HAM 2021
Tabel 3.10 Muatan Website JDIH Komnas HAM
Tabel 3.11 Rincian Belanja Komnas HAM Berdasarkan Program
Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Hibah Komnas HAM
Tabel 3.13 Pagu Anggaran dan Realisasi Biro Umum

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Biro Umum

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM

Grafik 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun 2016 - 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L
Gambar 3.2 Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan dan BMN
Gambar 3.3 Publikasi Laporan Keuangan TA 2020 Audited

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN



BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance)* dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Ketetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2020-2024, maka Laporan Kinerja Biro Umum ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Biro Umum Komnas HAM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *Good Governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Untuk itu Biro Umum senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Biro Umum sebagai unit kerja setingkat Eselon II di Sekretariat Jenderal Komnas HAM berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Namun peraturan tersebut belum digunakan di tahun 2021, sehingga untuk mencapai sasaran program/kegiatan yang telah disusun, Biro Umum masih menggunakan struktur lama yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 002/PERSES/III/2015.

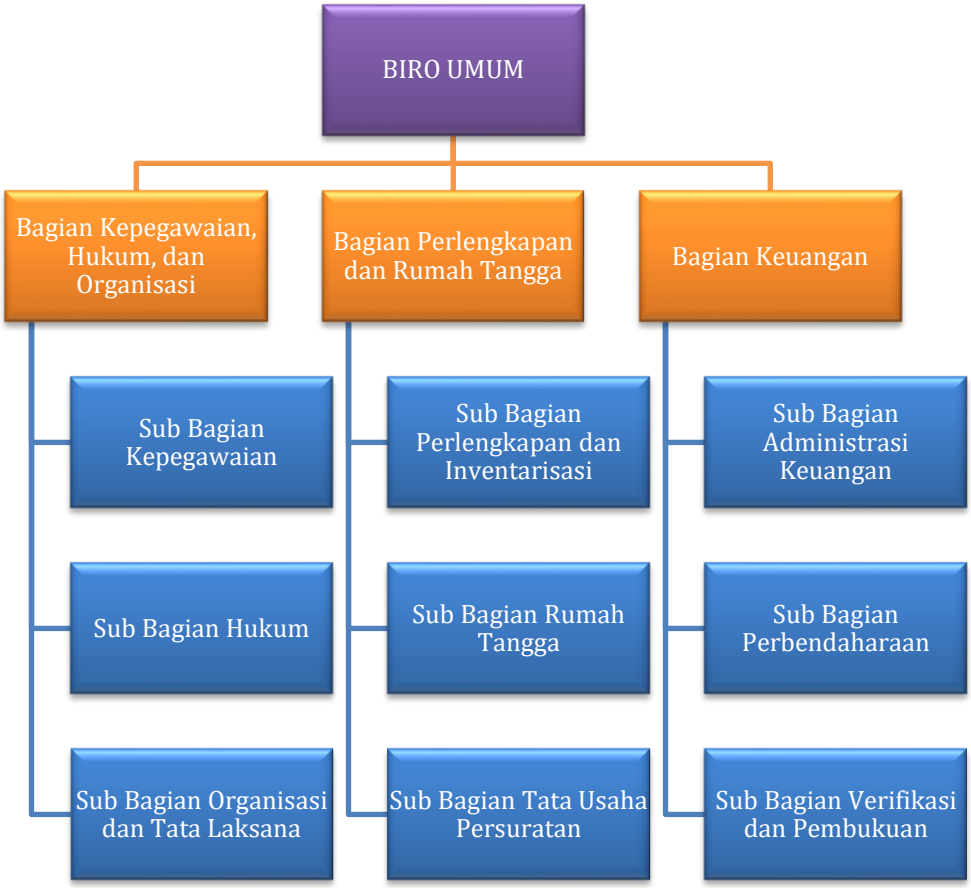
Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut maka Biro Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan keanggotaan Komnas HAM;
2. Pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
3. Pelaksanaan penguatan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
5. Pelaksanaan dukungan urusan persidangan;
6. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan;
7. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pinjaman/hibah;
8. Pelaksanaan tata usaha anggota Komnas HAM dan Setjen;
9. Pelaksanaan dan pengelolaan arsip;
10. Pelaksanaan tugas keprotokolan;
11. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

12. Pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, layanan kesehatan dan urusan tenaga kebersihan;
13. Pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin;
14. Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran.

Struktur Organisasi Biro Umum Komnas dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Biro Umum Komnas HAM



Komnas HAM sampai dengan akhir tahun 2021 memiliki sumber daya manusia sejumlah 271 orang PNS, 29 CPNS, dan 99 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tercermin dalam tabel berikut;

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM TA 2021

Pegawai Komnas HAM		L	P
CPNS	29	13	16
PNS	271	132	139
PPNPN	99	79	20
Total	**399**	**224**	**175**

Peran Strategis

Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Umum Komnas HAM Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang organisasi dengan menekankan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis organisasi di tingkat kelembagaan.

Bab II – PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan khususnya sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Umum.

Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Biro Umum terhadap target sasaran untuk tahun 2021.

Bab IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan umum atas Laporan Kinerja Biro Umum dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM kemudian mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM yang berat. Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkomitmen dengan visi :

Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sebagai penjabaran dari visi Komnas HAM tercantum dalam rencana strategis Komnas HAM yang ditetapkan melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020-2024 yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja Komnas HAM

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang Adil dan Beradab	1) Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara	1) Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara	1) Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
			2) Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian

			dengan Hak Asasi Manusia
			3) Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)
	2) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat	2) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
	3) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat	3) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
	4) Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM	4) Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Komnas HAM yang diturunkan dalam bentuk sasaran program yaitu terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel serta dioperasionalisasikan dalam bentuk sasaran kegiatan sebagai berikut.

Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran,Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diukur dengan indikator Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan tersebut diperlukan sebanyak delapan (8) dukungan layanan 1) Layanan Perkantoran, 2) Layanan Umum, 3) Layanan Kerumah Tanggaan, 3) Layanan Sarana Internal, 4) Layanan Prasarana Internal, 5) Layanan SDM, 6) Layanan Hukum, 7)

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, 8) Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal.

Atas layanan di atas diwujudkan ke dalam kegiatan penyelenggaraan layanan perkantoran, kepegawaian, keuangan, perundang-undangan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase layanan perkantoran;
2. Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMN;
3. Persentase Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Umum;
4. Persentase Layanan Sarana Internal;
5. Jumlah unit prasarana internal;
6. Persentase Layanan SDM;
7. Persentase penyelesaian pemberian layanan hukum;
8. Persentase pengelolaan JDIH;
9. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB; dan
10. Indeks Opini Badan Pemeriksa.

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Target, dan Alokasi Biaya Biro Umum

KODE	SASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2021		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI BIAYA (Rp RIBU)
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU, dan Bantuan Hukum			57.972.038
EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	50.383.455
EAA.001	Gaji dan Tunjangan Komnas HAM	1	Layanan	30.568.528
EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Komnas HAM	1	Layanan	19.814.927
EAC	Layanan Umum	2	Layanan	1.195.132
EAC.001	Layanan BMN	1	Layanan	200.761
EAC.002	Layanan Kerumah Tanggaan	1	Layanan	994.371
EAD	Layanan Sarana Internal	358	Unit	3.160.917
EAD.001	Layanan Sarana Internal Komnas HAM	358	Unit	3.160.917

EAE	Layanan Prasarana Internal	3	Unit	1.050.000
EAE.001	Layanan Prasarana Internal Komnas HAM	3	Unit	1.050.000
EAF	Layanan SDM	391	Orang	857.641
EAF.001	Layanan Manajemen SDM	391	Orang	857.641
EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	194.400
EAG.001	Layanan Hukum	1	Layanan	150.244
EAG.002	Layanan Dokumentasi Hukum	1	Layanan	44.156
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	486.024
EAH.001	Layanan Manajemen Organisasi	1	Layanan	486.024
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1	Dokumen	644.469
EAN.001	Dokumen Keuangan Unit Eselon I	1	Dokumen	644.469

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon II yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Umum telah ditetapkan pada Maret 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Umum

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya birokrasi yang berintegritas tinggi, bersih dari KKN	1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi	65%
		2. Opini Laporan Keuangan	WTP
		3. Persentase penatausahaan BMN	100%
		4. Persentase layanan kepegawaian	100%
		5. Persentase layanan hukum	100%

Tahun 2021 adalah tahun kedua Indonesia bergumul dengan dampak pandemi covid-19 dimana kebijakan fiskal untuk percepatan penanganan covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengakibatkan terjadinya penghematan APBN yang berdampak di semua K/L termasuk Komnas HAM. Berdasarkan Surat Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 serta Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-408/MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, Komnas HAM terdampak pemotongan anggaran yang semula Rp100.231.120.000,00 menjadi Rp92.324.073.000,00. Pemotongan anggaran tersebut tentu berdampak pula pada pemotongan anggaran di Biro umum yang semula sebesar Rp58.834.869.000,00 menjadi Rp57.972.038.000,00.

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 11, Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Tahun 2021, sebagai tahun transisi dimana penyederhanaan birokrasi mendorong Komnas HAM untuk melakukan transformasi jabatan dan penyesuaian organisasi serta pembentukan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM terus meningkatkan kinerja – kinerja melalui Peningkatan Reformasi Birokrasi, inovasi seperti *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan peningkatan kinerja yang berkualitas untuk mendukung kegiatan administrasi. Tantangan terbesar yang dihadapi Komnas HAM yaitu adanya pandemi Covid-19 dimana Komnas HAM harus memenuhi hak atas kesehatan dari pegawai, adanya kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran serta adanya kebijakan *Work from Home* (WFH) yang menuntut untuk dapat bekerja secara *mobile* dimana membutuhkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai. Kekosongan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selama hampir 1 tahun dialami oleh Komnas HAM yang mengakibatkan beberapa kinerja khususnya yang berhubungan dengan SDM dan Organisasi mengalami kendala sehingga Komnas HAM harus tetap melaksanakan kinerja secara maksimal tanpa harus bersinggungan dengan pengambilan keputusan khususnya Eselon I.

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Target, dan Alokasi Biaya Biro Umum

KODE	SASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU, dan Bantuan Hukum		
EAA	Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan
EAA.001	Gaji dan Tunjangan Komnas HAM	1 Layanan	1 Layanan
EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Komnas HAM	1 Layanan	1 Layanan
EAC	Layanan Umum	2 Layanan	2 Layanan
EAC.001	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan
EAC.002	Layanan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
EAD	Layanan Sarana Internal	358 Unit	433 Unit
EAD.001	Layanan Sarana Internal Komnas HAM	358 Unit	433 Unit
EAE	Layanan Prasarana Internal	3 Unit	1 Unit
EAE.001	Layanan Prasarana Internal Komnas HAM	3 Unit	1 Unit
EAF	Layanan SDM	391 Orang	391 Orang
EAF.001	Layanan Manajemen SDM	391 Orang	391 Orang
EAG	Layanan Hukum	2 Layanan	2 Layanan
EAG.001	Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan
EAG.002	Layanan Dokumentasi Hukum	1 Layanan	1 Layanan
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan
EAH.001	Layanan Manajemen Organisasi	1 Layanan	1 Layanan
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1 Layanan	1 Layanan
EAN.001	Dokumen Keuangan Unit Eselon I	1 Layanan	1 Layanan

Capaian Kinerja

A. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Sekretariat Jenderal Komnas HAM dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro – biro. Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan dan administratif, Komnas HAM didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk birokrasi lebih dinamis, *agile*, dan profesional yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, Komnas HAM melakukan transformasi jabatan dan penyesuaian organisasi sebagaimana Persetujuan dari MenPANRB Nomor B/1683/M.KT.01/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diimplementasikan dengan menyusun 2 (dua) Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, yaitu :



Untuk mendukung implementasi dari Perses Nomor 19 Tahun 2020, dari semula Komnas HAM memiliki 4 (empat) Biro menjadi 5 (lima) Biro, Komnas HAM melaksanakan penyesuaian baik dari segi SDM, perlengkapan dan anggaran. Berikut penyesuaian SDM yang sudah dilakukan:

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai Komnas HAM di Kantor Pusat

Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal	28	L	16
		P	12
Rincian			
Eselon I			
Eselon II		1	
Eselon III			
Eselon IV			
Jabatan Fungsional		15	
Jabatan Pelaksana		11	
CPNS			
PPNPN		1	

Biro Umum	150	L	93
		P	57
Rincian			
Eselon I			
Eselon II		1	
Eselon III		1	
Eselon IV		1	
Jabatan Fungsional		19	
Jabatan Pelaksana		59	
CPNS		11	
PPNPN		58	

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	21	L	8
		P	13
Rincian			
Eselon I			
Eselon II			
Eselon III			
Eselon IV			
Jabatan Fungsional		11	
Jabatan Pelaksana		9	
CPNS			
PPNPN		1	

Biro Dukungan Penegakan HAM	79	L	33
		P	46
Rincian			
Eselon I			
Eselon II		1	
Eselon III			
Eselon IV			
Jabatan Fungsional		20	
Jabatan Pelaksana		34	
CPNS		18	
PPNPN		6	

Biro Dukungan Pemajuan HAM	48	L	24
		P	24
Rincian			
Eselon I			
Eselon II			
Eselon III			
Eselon IV			
Jabatan Fungsional		21	
Jabatan Pelaksana		21	
CPNS			
PPNPN		6	

Tabel 3.3 Komposisi Pegawai Komnas HAM di Kantor Perwakilan

Sumatera Barat	16	L	9
		P	7
Rincian			
Eselon I			
Eselon II			
Eselon III		1	
Eselon IV		1	
Jabatan Fungsional		2	
Jabatan Pelaksana		8	
PPNPN		4	

Kalimantan Barat	12	L	7
		P	5
Rincian			
Eselon I			
Eselon II			
Eselon III		1	
Eselon IV		1	
Jabatan Fungsional			
Jabatan Pelaksana		5	
PPNPN		5	

Papua	13	L	6
		P	7
Rincian			
Eselon I			
Eselon II			
Eselon III		1	
Eselon IV		1	
Jabatan Fungsional		1	
Jabatan Pelaksana		5	
PPNPN		5	

Aceh	13	L	8
		P	5
Rincian			
Eselon I			
Eselon II			
Eselon III		1	
Eselon IV		1	
Jabatan Fungsional		3	
Jabatan Pelaksana		2	
PPNPN		6	

Maluku	8	L	4
		P	4
Rincian			
Eselon I			
Eselon II			
Eselon III		1	
Eselon IV		1	
Jabatan Fungsional		1	
Jabatan Pelaksana		3	
PPNPN		2	

Sulawesi Tengah	10	L	5
		P	5
Rincian			
Eselon I			
Eselon II			
Eselon III			
Eselon IV		1	
Jabatan Fungsional		2	
Jabatan Pelaksana		2	
PPNPN		5	

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Dalam rangka mendukung kinerja – kinerja Komnas HAM, Komnas HAM memerlukan dukungan SDM khususnya PNS dimana kebutuhan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pada periode 2017 s.d 2021, Komnas HAM melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) sebanyak 3 kali dengan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB dengan rincian sebagai berikut:

a) Keputusan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018;
b) Keputusan Menteri PANRB Nomor 655 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM Tahun Anggaran 2019; dan
c) Keputusan Menteri PANRB Nomor 738 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2021.

Untuk lebih jelasnya, jabatan dan alokasi yang disetujui oleh Menteri PANRB terkait seleksi CPNS di Komnas HAM, sebagai berikut:

Tabel 3.4 Alokasi CPNS Komnas HAM Tahun 2018 – 2021

CPNS KOMNAS HAM		
2018	**2019**	**2021**
123	15	29

Tahun 2020, Komnas HAM menyusun matriks kebutuhan formasi, sebagai dasar Komnas HAM dalam mengajukan alokasi CPNS Komnas HAM ke KemenPANRB. Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 121A/S.0.0.3/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penyampaian Hasil Matriks Kebutuhan Formasi Tahun 2020 – 2024, berikut rincian proyeksi 5 (lima) tahun kebutuhan formasi Komnas HAM:

Tabel 3.5 Proyeksi 5 (lima) Tahun Kebutuhan Formasi Komnas HAM

TAHUN	FORMASI CPNS
2020	17
2021	25
2022	37
2023	46
2024	65

Tahun 2020, KemenPANRB menyatakan tidak ada penerimaan PNS di setiap Instansi, yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 serta munculnya kebijakan Presiden terkait Penyederhanaan Birokrasi. Hal ini pun berdampak pada Komnas HAM, Tahun 2020 tidak menyelenggarakan penerimaan PNS, sehingga di tahun 2021 Komnas HAM mengajukan sebanyak 42 formasi namun hanya 29 formasi yang disetujui oleh Kemen PANRB.

2. *Human Capital Development Plan* (HCDP)

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang secara eksplisit memberikan kesempatan pengembangan kepada setiap PNS minimal 20 Jam Pelajaran (20 JP) per tahun dalam rangka mempersiapkan menuju Visi *Smart* ASN 2024, Komnas HAM berupaya untuk memetakan potensi SDM Aparatur yang ada, melihat kesenjangan yang timbul, kebutuhan kompetensi yang perlu diisi dan *Employee Assistance Program (EAP).*

3. Pengembangan Pegawai

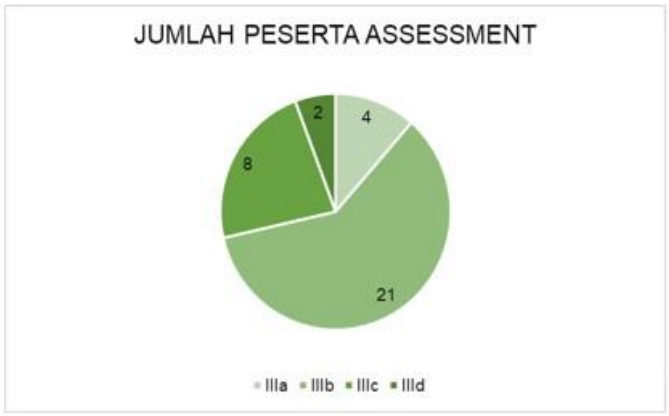
Dalam rangka meningkatkan kompetensi, potensi dan profesionalitas pegawai yang mampu mendukung kinerja Komnas HAM, diperlukan pengembangan pegawai melalui diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan dan pengembangan kompetensi lainnya.

Tabel 3.6 Pengembangan Pegawai Komnas HAM Tahun 2017 - 2021

Jenis Pengembangan kompetensi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Diklat teknis	23	42	255	16	18
Pelatihan dasar CPNS	-	-	3	121	12
Diklat fungsional	5	3	3	8	20
Diklat pimpinan	1	2	-	5	1
Pengembangan kompetensi lainnya	14	8	8	-	21
Total	**43**	**55**	**266**	**150**	**72**

4. *Assessment* PNS Komnas HAM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Komnas HAM menyelenggarakan penilaian kompetensi pada Sabtu, 18 Desember 2021 yang diikuti oleh 35 orang pegawai dengan kualifikasi Golongan III/a (masa kerja lebih dari 10 tahun) sampai dengan Golongan III/d (diprioritaskan untuk pegawai yang belum pernah mengikuti *assessment*).

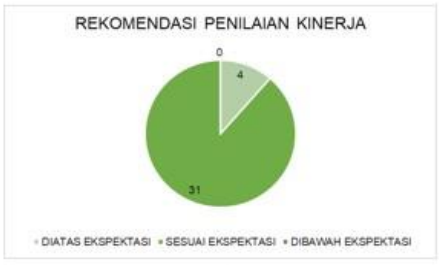


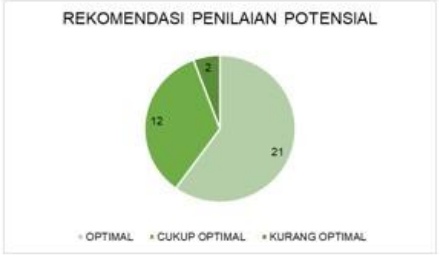
Assessment ini bertujuan untuk:

a) Promosi dan mutasi;
b) Rencana pengembangan kompetensi;
c) Penentuan kebutuhan pelatihan; dan
d) Identifikasi talenta.

Dari hasil *assessment* yang dilakukan, didapatkan hasil gap kompetensi, rekomendasi penilaian kinerja dan rekomendasi penilaian potensial sebagai berikut:







Dari hasil gap kompetensi, rekomendasi penilaian kinerja dan rekomendasi penilaian potensial didapatkan rekomendasi akhir, yaitu :

a) Dipromosikan dan dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi/nasional, penghargaan sebanyak 3 orang;
b) Dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi, rotasi/perluasan jabatan, bimbingan kinerja sebanyak 18 orang;
c) Dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi, rotasi/pengayaan jabatan, pengembangan kompetensi, tugas belajar sebanyak 1 orang;
d) Penempatan yang sesuai, bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi sebanyak 11 orang; dan
e) Bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi, penempatan yang sesuai sebanyak 2 orang.

5. *Employee Assistance Program (EAP)*

Employee Assistance Program (EAP) adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dengan tujuan untuk membantu memecahkan permasalahan pegawai seputar kesehatan mental. Dengan begitu, ketika pegawai sedang mengalami *burnout* atau *stress* karena pekerjaan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja. Konseling diharapkan dapat meminimalisir dan membantu pegawai menemukan solusi terbaiknya.

Program ini meliputi 2 kegiatan, yaitu :

a) *Mental Health Awareness Seminar & Classical Assessment* (screening kesehatan mental, ke dalam 4 kategori: hijau, kuning, oranye, merah), dan
b) Konseling dan Psikoterapi untuk kategori kesehatan mental merah.



Kegiatan *Mental Health Awareness Seminar & Classical Assessment* dilaksanakan melalui webinar, dengan sasaran peserta seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang diikuti oleh 178 orang, terdiri dari wanita 110 orang dan pria 68 orang. Dari kegiatan tersebut, didapatkan frekuensi *burnout*, kriteria positif kesehatan mental, kriteria negatif kesehatan mental (*distress, deviance, dysfunction* dan *danger*).

Frekuensi diatas, dihitung kembali *cross tabulation* makna kriteria negatif kesehatan mental dengan makna *burnout*, dengan hasil :

a) 15 orang yang memiliki *burnout* dan kriteria negatif kesehatan mental dalam level merah;
b) 11 orang yang memiliki *burnout* dalam level oranye dan kriteria negatif kesehatan mental dalam level oranye; dan
c) 9 orang yang memiliki *burnout* dalam level merah dan kriteria negatif kesehatan mental dalam level oranye.

Menindaklanjuti hasil screening tersebut, Komnas HAM mendaftarkan 15 orang yang masuk dalam kategori merah sehingga membutuhkan pendampingan psikologis segera. Pegawai dengan kategori merah memiliki tingkat *burnout* yang sangat tinggi dan tingkat kesehatan mental yang sangat rendah. Selain 15 pegawai tersebut, terdapat 2 pegawai kategori orange yang didaftarkan untuk melakukan konseling individu.

6. Penguatan Reformasi Birokrasi

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Komnas HAM melakukan evaluasi, menyusun rencana aksi penguatan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan evaluasi Implementasi AKIP 2021 dengan KemenPANRB. Evaluasi dilaksanakan baik di Pusat maupun di 4 (empat) Biro yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama, Biro Dukungan Pemajuan HAM, serta Biro Dukungan Penegakan HAM. Dari hasil evaluasi, KemenPANRB memberikan masukan terkait hal – hal yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komnas HAM yaitu :

a) Peran aktif pimpinan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi;
b) Lebih meningkatkan peran serta Agen Perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
c) Agen Perubahan harus memiliki rencana kerja yang nyata;
d) Implementasi nilai-nilai Organisasi;
e) Penetapan Peta Proses Bisnis Komnas HAM;
f) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
g) Pencanangan Zona Integritas;
h) Penerapan *Reward and Punishment* bagi pegawai; dan
i) Belum adanya maklumat pelayanan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/31/M.RB.06/2022 Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Komnas HAM mendapatkan Indeks 71,54 dengan kategori BB, rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2020 - 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Komponen Pengungkit			
I	Pemenuhan	20,00	14,81	15,85
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,11	5,87
III	Reform	30,00	17,73	19,15
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**39,65**	**40,87**
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,35	7,48
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,70	8,29
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,18	6,83
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,10	8,07
Total Komponen Hasil		**40,00**	**31,32**	**30,67**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**70,97**	**71,54**

7. Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

Tahun 2021, Komnas HAM membentuk Jabatan Fungsional Mandiri yang bersifat tertutup. Hal ini ditetapkan melalui PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM tanggal 30 Maret 2021. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Komnas HAM berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Saat ini, Komnas HAM telah menyelesaikan 4 (empat) tugas dari 19 (sembilan belas) tugas Instansi Pembina, yaitu:

a) Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
b) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
c) Pedoman Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/*Inpassing*; dan
d) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

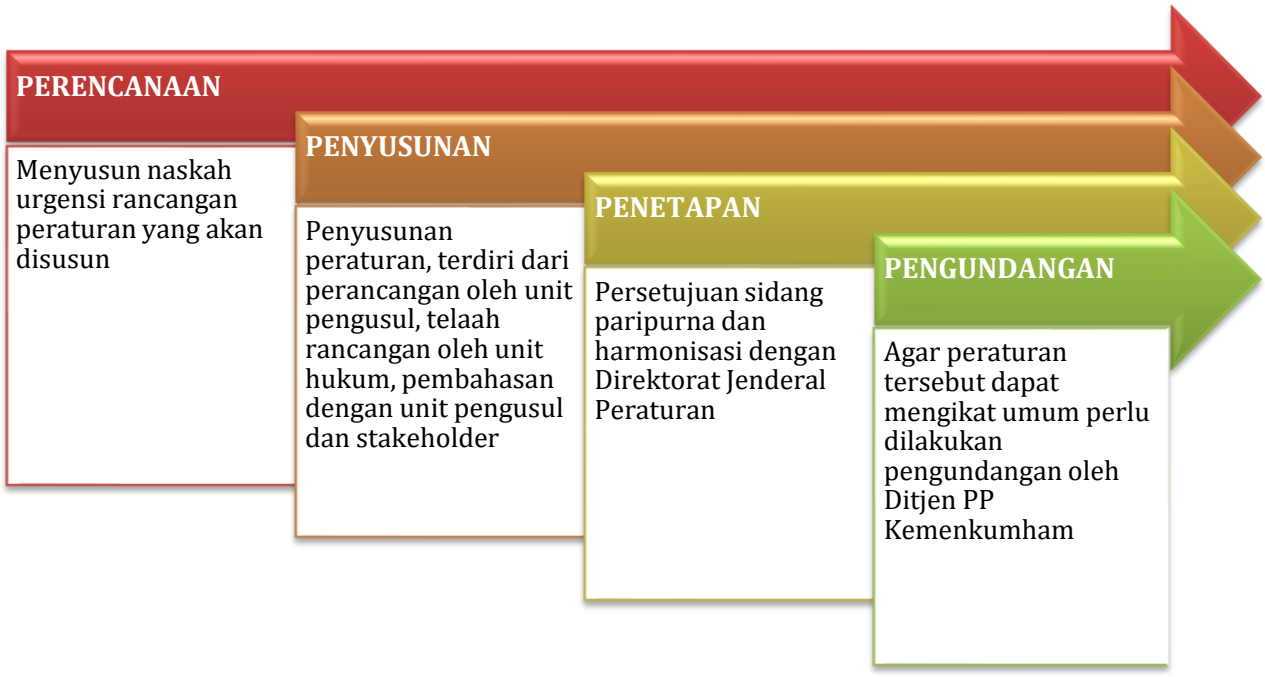
Komnas HAM telah mendapatkan Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM Nomor: B/92/M.SM.01.00/2022 tanggal 10 Januari 2022, dengan rincian kebutuhan formasi sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kebutuhan Formasi Penata Mediasi Sengketa HAM

No	Nama Jabatan	Usulan Kebutuhan
1	Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Ahli Madya	6
2	Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Ahli Muda	10
3	Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Ahli Pertama	17
Total		**33**

8. Harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan

Kewenangan Komnas HAM dalam menetapkan peraturan perUndang-Undangan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, bahwa jenis peraturan perUndang-Undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Pembentukan peraturan Komnas HAM juga harus melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, penetapan hingga pengundangan.



Dalam bidang penyusunan peraturan, selain peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, terdapat peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan atau disebut dengan peraturan kebijakan (legislasi semu). Legislasi semu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badan-badan pemerintahan (badan tata usaha negara), baik di tingkat pusat maupun daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Perbedaan antara legislasi semu dengan peraturan perundang-undangan adalah dalam hal daya mengikatnya secara umum kepada masyarakat. Di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM peraturan kebijakan ini dapat berupa

keputusan yang bersifat mengatur meliputi Keputusan Ketua Komnas HAM, Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Instruksi, Surat Edaran, dan Pengumuman.

Tabel 3.9 Produk Hukum Komnas HAM 2021

PERATURAN KEBIJAKAN	2021
Rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	8
Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	5
Rancangan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1

9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Komnas HAM menyusun Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai dasar pelaksanaan JDIH di Komnas HAM.

Perkembangan JDIH Komnas HAM selanjutnya cukup dinamis. Pada tahun 2020, JDIH Komnas HAM melakukan upaya pengisian dan pengayaan konten produk hukum Komnas HAM yang pernah diterbitkan. Upaya tersebut diikuti dengan proses integrasi data produk hukum yang diupload dengan sistem JDIH Nasional. JDIH Komnas HAM pada 2021 mengupayakan pengembangan website https://jdih.komnasham.go.id/ dengan menyesuaikan aplikasi standar JDIH dari BPHN, yakni aplikasi *Indonesian Legal Documentation dan Information System* (ILDIS). Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses integrasi konten dengan JDIH Pusat. Mengenai materi muatannya, sampai saat ini *website* JDIH Komnas HAM telah mampu menyajikan berbagai jenis muatan yang terdiri dari Instrumen HAM, Undang-Undang, TAP MPR, Peraturan Presiden, Peraturan Komnas HAM, Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, MoU, Surat Edaran, Salinan Putusan perkara yang melibatkan Komnas HAM, dan Kajian Hukum Komnas HAM.

Tabel 3.10 Muatan *Website* JDIH Komnas HAM

JENIS MUATAN / KONTEN	2021
Undang-Undang	4
Ketetapan MPR	1
Peraturan Pemerintah	3
Peraturan Presiden	3
Peraturan Komnas HAM	30
Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM	22
Surat Edaran	17
MoU	36
Instrumen Internasional	10
Informasi Hukum Lainnya	22
Total	**148**

B. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

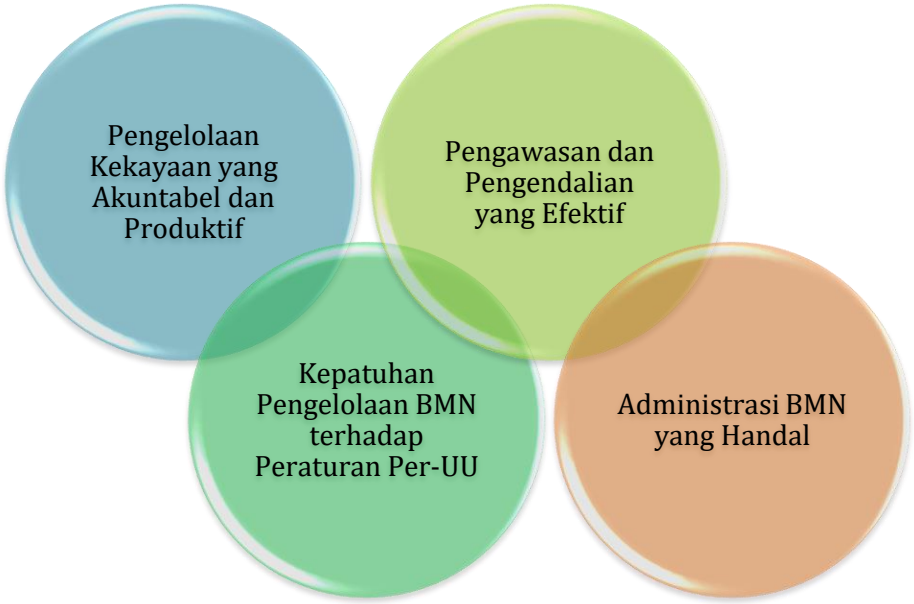
Bagian Rumah Tangga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan baik dalam bidang sarana dan prasarana internal demi tercapainya pelayanan prima di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adapun uraian Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga yang telah dilakukan selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas sebagai pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas;
2. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan surat-surat lainnya yang merupakann tugas pokok dan fungsi;
3. Pengurusan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dan untuk kepentingan dinas;
4. Mengurus segala keperluan rumah tangga Komnas HAM yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
5. Pelaksanaan pengaturan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung dan barang inventaris milik Negara di Komnas HAM;
6. Mengelola administrasi pembelian, pembayaran serta pengadaan kebutuhan barang dan jasa baik yang rutin maupun tidak rutin;

7. Melakukan koordinasi dengan unit/bagian kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun Program Kerja di bidang tugasnya dan memantau langsung pelaksanaannya;
9. Melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang;
10. Memelihara semua aset Komnas HAM agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
11. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;
12. Melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang inventarisasi Komnas HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Memanfaatkan barang milik/dikuasai Komnas HAM tanpa merubah status pemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Mengamankan barang milik/dikuasai Komnas HAM secara fisik, administratif dan tindakan hukum;
15. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang inventaris Komnas HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Menyelenggarakan pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat;
17. Melakukan pendistribusian barang dari gudang kepada unit kerja pemakai;
18. Melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang habis pakai kebutuhan rumah tangga;
19. Membantu perencanaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), cetakan, pada bagian-bagian di lingkungan Komnas HAM sesuai dengan anggaran yang tersedia;
21. Mempelajari dan menelaah Peraturan perundang-undangan tentang pedoman, sasaran dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan penyediaan barang milik negara; dan
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Pengelolaan Barang Milik Negara

Tahun 2021, Komnas HAM mendapatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebesar 3,46 (skala 4) dengan rata-rata Nasional yaitu sebesar 2,87 terdiri dari 4 (empat) parameter yang dijadikan penilaian, yaitu :



Nilai BMN *unaudited* gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 *Unaudited* ini adalah sebesar Rp44.562.655.585,00 (empat puluh empat milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp41.521.108.586,00 (empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat nilai mutasi tambah sebesar Rp4.993.917.375,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terdapat mutasi kurang selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.952.370.376,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode Tahun Anggaran

2021. Sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode Tahun Anggaran 2021. Laporan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 *Unaudited* merupakan LPB pada 1 (satu) eselon I dan 1 (satu) Kuasa Pengguna Barang, yaitu satker (satuan kerja) Kantor Pusat.

2. Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Komnas HAM cukup aktif dalam melakukan pengadaan. Pengadaan dilakukan dengan berbagai metode mulai dari *e-Purchasing*, Pengadaan Langsung dan Tender. Berikut pengadaan barang modal yang dilakukan oleh anggota Unit Layanan Pengadaan melalui metode *e-Purchasing* dan Pengadaan Langsung:

a) 219 Unit Laptop untuk mendukung kinerja ASN selama masa pandemi Covid-19;
b) 36 Unit AC (Pendingin Udara);
c) 3 Unit *Workstation;*
d) Peralatan Meubelair (Kursi Kerja);
e) 6 Unit Telepon Satelit;
f) 5 Unit Rompi Anti Peluru;
g) Kamera *Drone;*
h) Kamera DSLR;
i) Kamera *Camcorder;* dan
j) Peralatan Pendukung Rapat *Online* untuk Pimpinan dan Anggota Komnas HAM.

Tercatat ada 3 Tender yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2021. Ketiga tender tersebut adalah :

a) Tender Pemilihan Penyedia Jasa *Outsourcing* Kebersihan Komnas HAM Republik Indonesia TA 2021.
b) Tender Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi Sistem Pengaduan HAM Online Komnas HAM Republik Indonesia TA 2021.
c) Tender Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Pengaduan Pusat Komnas HAM Republik Indonesia TA 2021.

Bersamaan dengan kegiatan inti Unit Layanan Pengadaan di atas, anggota Unit Layanan Pengadaan Komnas HAM menyadari bahwa ada kebutuhan untuk terus mengembangkan

diri dan melakukan pembelajaran. Hal ini terkait dengan seiring adanya pembaharuan peraturan dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Oleh karena hal tersebut, Unit Layanan Pengadaan mengadakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan peserta seluruh anggota ULP, Pejabat Pembuat Komitmen dan mengundang narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan materi sebagai berikut:

a) Dasar-dasar pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Indeks Reformasi Brokrasi Tata Kelola Pengadaan yang dilihat dari komponen kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa; dan
c) Arah kebijakan kelembagaan Pengadaan Barang Jasa (pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) sebagai salah satu indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pengadaan.

C. BAGIAN KEUANGAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komnas HAM adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2021 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan Tahun 2021 berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP artinya bahwa Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material.

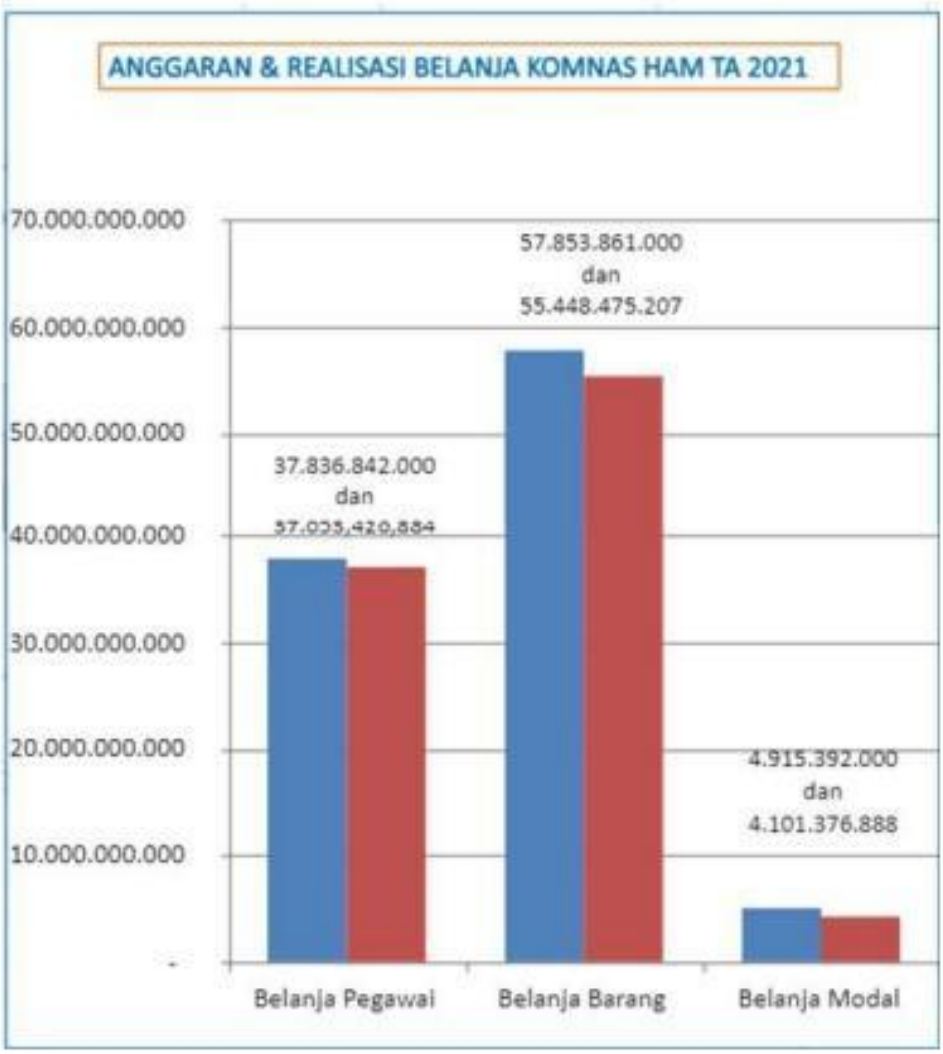
Anggaran Komnas HAM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp100.606.095.000,00 (Seratus milyar enam ratus enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari anggaran Rupiah Murni sebesar Rp92.324.073.000,00 dan hibah dalam negeri maupun luar negeri sebesar Rp8.282.022.000,00 yang dialokasikan untuk 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rincian Belanja Komnas HAM Berdasarkan Program

PROGRAM	2021		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Dukungan Manajemen (074.01.WA)	**73.661.499.000**	**71.312.516.524**	**96,81**
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan, dan Kerjasama (3335)	3.531.194.000	3.414.468.996	96,69
Penyelenggaraan layanan perkantoran, kepegawaian, keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum (3336)	57.972.038.000	55.878.144.184	96,39
Dukungan Internal Komnas Perempuan (6387)	12.158.267.000	12.019.903.344	98,86
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (074.01.06)	**26.944.596.000**	**25.290.762.455**	**93,86**
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara (5679)	6.052.842.000	5.815.764.197	96,08
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (5680)	7.264.497.000	6.797.842.449	93,58
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban (5681)	13.627.257.000	12.677.155.809	93,03
Total Belanja	**100.606.095.000**	**96.603.278.979**	**96,02**

Berdasarkan Laporan Keuangan TA 2021 *Unaudited* maka realisasi anggaran komnas HAM adalah sebesar Rp96.603.278.979,00 (Sembilan puluh enam milyar enam ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96.02% dari anggaran belanja. Serapan ini naik dibandingkan tahun 2020 *Audited* sebesar Rp614.605.457,00 atau sebesar 0.64%.

Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM

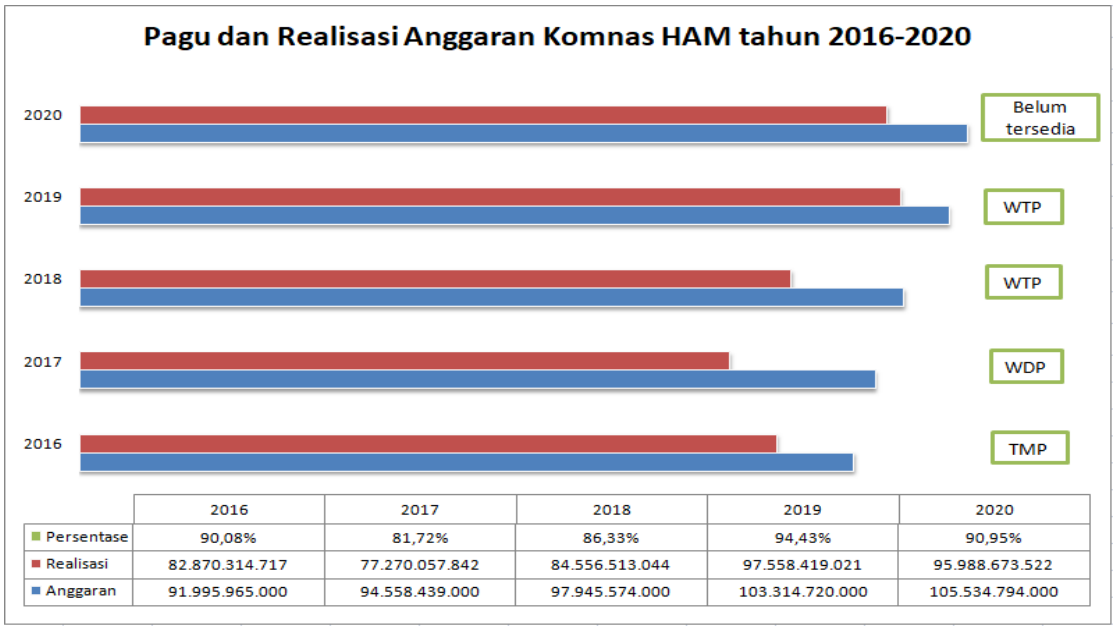


Sementara itu dana hibah yang diterima oleh Komnas HAM TA 2021 berasal dari donor dalam negeri yaitu hibah Pemda Provinsi Papua dan hibah luar negeri yaitu AUSAID, UNFPA, UNWOMEN dan EU. Berikut adalah realisasi hibah Komnas HAM TA 2021.

Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Hibah Komnas HAM

DONOR	PAGU	REALISASI	SISA	%
AUSAID MAMPU	2.080.737.000	2.080.418.710	318.290	99.98
UNFPA	928.243.000	925.579.422	2.663.578	99.71
EU	1.513.027.000	1.454.419.688	58.607.312	96.13
PEMDA PAPUA	500.000.000	499.186.430	813.570	99.84
PEMDA KALBAR	200,000,000	188.169.851	11.830.149	94.08
Total	**5.222.007.000**	**5.147.774.101**	**74.232.899**	**98.58**

Grafik 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun 2016 - 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase	90,08%	81,72%	86,33%	94,43%	90,95%
Realisasi	82.870.314.717	77.270.057.842	84.556.513.044	97.558.419.021	95.988.673.522
Anggaran	91.995.965.000	94.558.439.000	97.945.574.000	103.314.720.000	105.534.794.000

Opini Laporan Keuangan

Komnas HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan opini WTP tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto pada hari Selasa, 29 Juni 2021, di Auditorium BPK RI, Jakarta.



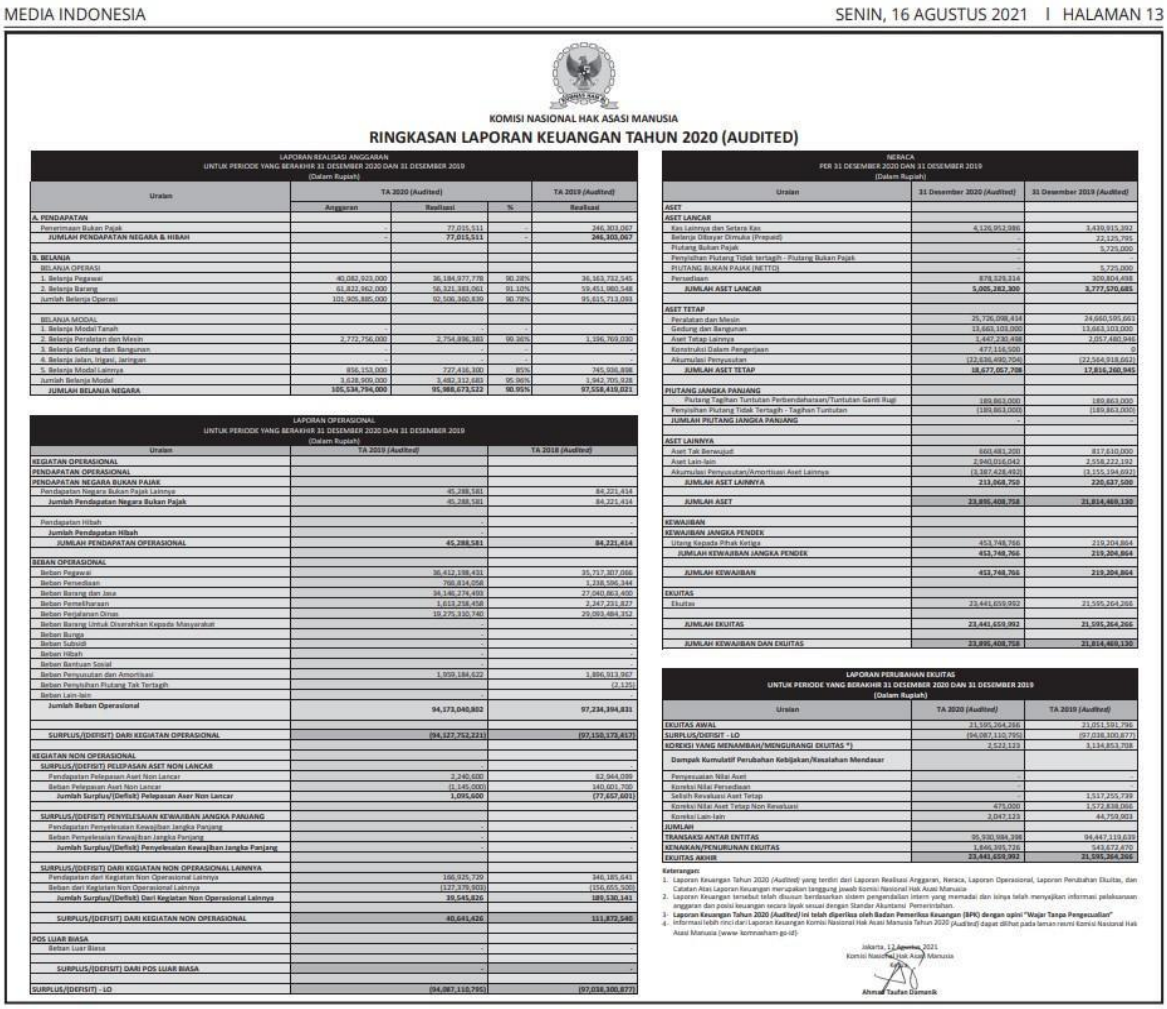
Gambar 3.1 Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L

Pelaporan akuntansi yang bermuara pada pencapaian opini WTP tetap perlu dijaga terus menerus dari hulu ke hilir. Setiap transaksi betul-betul harus dijaga, jika masih terjadi kesalahan perlu dilakukan *early warning system* dengan memperbaiki pengendalian internal. Disinilah peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dalam konteks Komnas HAM diperankan oleh Pengawas Internal (PI), menjadi sangat penting untuk mengawal dan mendampingi pelaksana teknis sejak awal dalam pelaksanaan anggaran. Karena setiap pertanggungjawaban yang salah dan SDM yang tidak disiplin akan terpotret di akhir periode yaitu dalam Laporan Keuangan, sehingga dalam menyebabkan kualitas Laporan Keuangan menjadi menurun. Walaupun Laporan Keuangan sudah mendapatkan opini WTP, belum menjadi jaminan bahwa di tahun berikutnya akan meraih opini WTP kembali, sehingga menjadi tantangan bagi Komnas HAM dalam menyusun Laporan Keuangan mengingat dinamikanya sangat tinggi dan transaksi keuangan pemerintah semakin kompleks. Hal ini disampaikan oleh Wiwin Istanti, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, pada saat menjadi *keynote speaker* pada acara "Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2021 yang Andal dan Akuntabel" di Hotel Morrissey Jakarta tanggal 18 Juni 2021.



Gambar 3.2 Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan dan BMN

Menindaklanjuti instruksi Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/S/I/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diperiksa (*Audited*), dilaksanakan publikasi terhadap Laporan Keuangan *Audited* TA 2020. Publikasi ini dilakukan melalui media Koran Media Indonesia edisi tayang Jumat, 09 Oktober 2020.



MEDIA INDONESIA — SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | HALAMAN 13

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2020 (Audited)			TA 2019 (Audited)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. PENDAPATAN				
Penerimaan Bukan Pajak	-	77,015,511	-	246,303,067
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA & HIBAH	-	77,015,511	-	246,303,067
B. BELANJA				
BELANJA OPERASI				
1. Belanja Pegawai	40,082,923,000	36,184,977,778	90.28%	36,163,732,545
2. Belanja Barang	61,822,962,000	56,321,383,061	91.10%	59,451,980,548
Jumlah Belanja Operasi	101,905,885,000	92,506,360,839	90.78%	95,615,713,093
BELANJA MODAL				
1. Belanja Modal Tanah	-	-	-	
2. Belanja Peralatan dan Mesin	2,772,756,000	2,754,896,383	99.36%	1,196,769,030
3. Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	
4. Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-	
5. Belanja Modal Lainnya	856,153,000	727,416,300	85%	745,936,898
Jumlah Belanja Modal	3,628,909,000	3,482,312,683	95.96%	1,942,705,928
JUMLAH BELANJA NEGARA	105,534,794,000	95,988,673,522	90.95%	97,558,419,021

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	45,288,581	84,221,414
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	45,288,581	84,221,414
Pendapatan Hibah	-	
Jumlah Pendapatan Hibah	-	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	45,288,581	84,221,414
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai	36,412,198,431	35,717,307,066
Beban Persediaan	766,814,056	1,238,596,344
Beban Barang dan Jasa	34,146,274,493	27,040,863,400
Beban Pemeliharaan	1,613,258,456	2,247,231,827
Beban Perjalanan Dinas	19,275,330,745	29,093,484,352
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	
Beban Bunga	-	
Beban Subsidi	-	
Beban Hibah	-	
Beban Bantuan Sosial	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,959,184,622	1,886,913,967
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	(2,125)
Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban Operasional	94,173,040,802	97,234,394,831
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(94,127,752,221)	(97,150,173,417)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	-	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,240,600	82,944,099
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(1,145,000)	140,601,700
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1,095,600	(77,657,601)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	166,925,720	346,185,643
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(127,379,901)	(156,655,500)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	39,545,826	189,530,141
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	40,641,426	111,872,540
POS LUAR BIASA		
Beban Luar Biasa	-	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(94,087,110,795)	(97,038,300,877)

NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,126,952,980	3,430,915,392
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	-	22,125,795
Piutang Bukan Pajak	-	5,725,000
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	-	5,725,000
Persediaan	878,329,314	309,804,498
JUMLAH ASET LANCAR	5,005,282,300	3,777,570,685
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	25,726,098,414	24,660,589,667
Gedung dan Bangunan	13,663,103,000	13,663,103,000
Aset Tetap Lainnya	1,447,230,498	2,057,480,946
Konstruksi Dalam Pengerjaan	477,116,500	0
Akumulasi Penyusutan	(22,636,490,704)	(22,564,918,662)
JUMLAH ASET TETAP	18,677,057,708	17,816,260,945
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	189,863,000	189,863,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan	(189,863,000)	(189,863,000)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	-	-
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	660,481,200	817,610,000
Aset Lain-lain	2,940,016,042	2,558,222,192
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(3,387,424,492)	(3,155,194,692)
JUMLAH ASET LAINNYA	213,068,750	220,637,500
JUMLAH ASET	23,895,408,758	21,814,469,130
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Kepada Pihak Ketiga	453,748,766	219,204,864
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	453,748,766	219,204,864
JUMLAH KEWAJIBAN	453,748,766	219,204,864
EKUITAS		
Ekuitas	23,441,659,992	21,595,264,266
JUMLAH EKUITAS	23,441,659,992	21,595,264,266
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23,895,408,758	21,814,469,130

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
EKUITAS AWAL	21,595,264,266	21,051,591,796
SURPLUS/DEFISIT - LO	(94,087,110,795)	(97,038,300,877)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	2,522,123	3,134,853,708
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	1,517,255,739
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	475,000	1,572,638,066
Koreksi Lain-lain	2,047,123	44,759,903
JUMLAH		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	95,930,984,398	94,447,119,635
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,846,395,726	543,672,470
EKUITAS AKHIR	23,441,659,992	21,595,264,266

Keterangan:
1. Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan bilnya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. **Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited)/ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian"**
4. Informasi lebih rinci dari Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 (Audited) dapat dilihat pada laman resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (www.komnasham.go.id)

Jakarta, 12 Agustus 2021
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Ketua

Ahmad Taufan Damanik

Gambar 3.3 Publikasi Laporan Keuangan TA 2020 *Audited*

Realisasi Anggaran

Di awal tahun 2021, Biro Umum menerima anggaran Rupiah Murni sebesar Rp58.834.869.000,00. Namun di pertengahan tahun anggaran, terdapat beberapa kebijakan *refocusing* dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021

dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-408/MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Total anggaran Biro Umum setelah adanya *refocusing* menjadi Rp57.972.038.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.13 Pagu Anggaran dan Realisasi Biro Umum

KODE	SASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2021 (Rp RIBU)		
		PAGU	REALISASI	%
3336	**Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU, dan Bantuan Hukum**	**57.972.038**	**55.878.144**	**96,4**
EAA	Layanan Perkantoran	50.383.455	49.324.633	97,9
EAA.001	Gaji dan Tunjangan Komnas HAM	30.568.528	29.803.716	97,5
EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Komnas HAM	19.814.927	19.520.917	98,5
EAC	Layanan Umum	1.195.132	1.149.737	96,2
EAC.001	Layanan BMN	200.761	198.722	99,0
EAC.002	Layanan Kerumah Tanggaan	994.371	951.015	95,6
EAD	Layanan Sarana Internal	3.160.917	3.118.316	98,7
EAD.001	Layanan Sarana Internal Komnas HAM	3.160.917	3.118.316	98,7
EAE	Layanan Prasarana Internal	1.050.000	275.914	26,3
EAE.001	Layanan Prasarana Internal Komnas HAM	1.050.000	275.914	26,3
EAF	Layanan SDM	857.641	727.842	84,9
EAF.001	Layanan Manajemen SDM	857.641	727.842	84,9
EAG	Layanan Hukum	194.400	190.824	98,2
EAG.001	Layanan Hukum	150.244	148.252	98,7
EAG.002	Layanan Dokumentasi Hukum	44.156	42.572	96,4
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	486.024	453.468	93,3
EAH.001	Layanan Manajemen Organisasi	486.024	453.468	93,3
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	644.469	637.410	98,9
EAN.001	Dokumen Keuangan Unit Eselon I	644.469	637.410	98,9

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN



BAB IV
PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Umum Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2021, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, pembinaan, pemberian dukungan manajemen dan administrasi pada kesekjenan Komnas HAM.

Apabila dilihat dari capaian yang diperoleh selama tahun 2021, secara umum program dan kegiatan di Biro Umum telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Namun demikian masih dijumpai hambatan dalam pelaksanaan seperti revisi kegiatan yang memerlukan waktu, sehingga perlu penjadwalan ulang dengan penyesuaian kegiatan yang direvisi.

Belajar dari pengalaman, ke depan dalam rangka meningkatkan kinerjanya maka Biro Umum perlu:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal Biro Umum dan lintas sektor dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran;
2. Merencanakan program dan kegiatan yang komprehensif mengacu pada Renstra dan Rencana Kinerja;
3. Meningkatkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait;
4. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan;
5. Melakukan monitoring untuk mengukur capaian kinerja secara berkala; dan
6. Meningkatkan peran Pejabat Fungsional.

Laporan Kinerja (LKjIP) Biro Umum tahun ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan, serta utamanya dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan perencanaan Biro Umum ke depan, hal ini sesuai dengan salah satu fungsi utama LKjIP.

Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pencapaian produktivitas masing-masing unit kerja di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal Komnas HAM di masa yang akan datang.

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sebelum Refocusing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya K/L/D yang memahami Standar Norma HAM	1. Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma HAM	20 persen
2	Meningkatnya hasil kajian/penelitian yang ditindak lanjuti oleh penyelenggara negara	1. Persentase hasil kajian/penelitian yang yang ditindaklunjuti ke dalam peraturan perundang-undangan	50 persen
3	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	1. Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM	20 persen
		2. Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengamatan situasi HAM	100 persen
		3. Persentase penyelesaian penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial	50 persen
		4. Persentase korban pelanggaran HAM yang berat yang terpenuhi haknya	100 persen
4	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat	1. Persentase masyarakat yang perilakunya selaras dengan HAM	30 persen
5	Meningkatnya kerjasama strategis nasional dan internasional	1. Persentase kerjasama strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	25 persen
6	Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel	1. Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM	70
		2. Nilai akuntabilitas	B

a

	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 74.846.939.000,-
2.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp 25.384.181.000,-

Jakarta, 4 Januari 2021

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Ahmad Taufan Damanik

Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

b

Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sesudah Refocusing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya K/L/D yang memahami Standar Norma HAM	1. Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma HAM	20 persen
2	Meningkatnya hasil kajian/penelitian yang ditindak lanjuti oleh penyelenggara negara	1. Persentase hasil kajian/penelitian yang yang ditindaklunjuti ke dalam peraturan perundang-undangan	50 persen
3	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	1. Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM	20 persen
		2. Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengamatan situasi HAM	100 persen
		3. Persentase penyelesaian penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial	50 persen
		4. Persentase korban pelanggaran HAM yang berat yang terpenuhi haknya	100 persen
4	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat	1. Persentase masyarakat yang perilakunya selaras dengan HAM	30 persen
5	Meningkatnya kerjasama strategis nasional dan internasional	1. Persentase kerjasama strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	25 persen
6	Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel	1. Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM	70
		2. Nilai akuntabilitas	B

c

	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 73.547.368.000,-
2.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp 23.347.686.000,-

Jakarta, 1 Maret 2021

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Ahmad Taufan Damanik

Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

d

PERJANJIAN KINERJA ESELON II BIRO UMUM SEBELUM REFOCUSING

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal	1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal.	100 persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	Rp 58.834.869.000,-

Jakarta, Januari 2021

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

PERJANJIAN KINERJA ESELON II BIRO UMUM SESUDAH REFOCUSING

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal	1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal.	100 persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	Rp 58.141.152.000,-

Jakarta, Maret 2021

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

RO/KRO BIRO UMUM TA 2021

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
074.06. WA	Program Dukungan Manajemen				
3336	Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum				56,002,308,000
3336.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line]	2	Layanan		48,621,815,000
3336.EAA.001	Gaji dan Tunjangan Komnas HAM	1	Layanan		30,568,528,000
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				30,568,528,000
3336.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Komnas HAM	1	Layanan		18,053,287,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				18,053,287,000
3336.EAC	Layanan Umum[Base Line]	2	Layanan		1,099,007,000
3336.EAC.001	Layanan BMN	1	Layanan		200,761,000
3336.EAC.002	Layanan Kerumah Tanggaan	1	Layanan		898,246,000
3336.EAD	Layanan Sarana Internal[Base Line]	348	unit		3,114,417,000
3336.EAD.001	Layanan Sarana Internal Komnas HAM	348	unit		3,114,417,000
3336.EAE	Layanan Prasarana Internal[Base Line]	3	unit		1,050,000,000
3336.EAE.001	Layanan Prasarana Internal Komnas HAM	3	Unit		1,050,000,000
3336.EAF	Layanan SDM[Base Line]	391	orang		857,641,000
3336.EAF.001	Layanan Manajemen SDM	391	Orang		857,641,000
3336.EAG	Layanan Hukum[Base Line]	2	Layanan		194,400,000
3336.EAG.001	Layanan Hukum	1	Layanan		150,244,000
3336.EAG.002	Layanan Dokumentasi Hukum	1	Layanan		44,156,000
3336.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal[Base Line]	1	Layanan		486,024,000
3336.EAH.001	Layanan Manajemen Organisasi	1	Layanan		486,024,000
3336.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal[Output Baru - Perubahan Kebijakan]				579,004,000
3336.EAN.001	Dokumen Keuangan Unit Eselon I				579,004,000